



MODUL AKUNTANSI LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Disusun oleh:

Muh. Ziaul Haq Bakri, S.E., M.Ak.
Marannu Paledung, S.E., M.Ak.



Kata Pengantar



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat, petunjuk, kekuatan, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi tentang **“Pembuatan E-Modul Pembelajaran Mata Kuliah Akuntansi Sosial dan Lingkungan di Prodi Akuntansi FEB Universitas Pattimura”** ini dengan baik. Laporan Aktualisasi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam Pelatihan Dasar CPNS Gelombang 3 Angkatan 16 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2026. Laporan ini merupakan Rancangan Aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS dalam menjalankan tugas pokok sebagai Dosen Asisten Ahli di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura. Pada Kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Teddy Leasiwal, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan izin pelaksanaan kegiatan aktualisasi serta dukungan kebijakan dan fasilitas dalam penyusunan dan implementasi e-modul pembelajaran.
2. Dr. Amaluddin, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan 1 bidang Akademik sekaligus Mentor di unit kerja penempatan Penulis yang telah memberikan banyak pengetahuan dan telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan Penulis dalam rangka penyusunan Laporan Rancangan Kegiatan Aktualisasi;
3. Seluruh dosen dan pegawai Program Studi Akuntansi yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Aktualisasi;
4. Seluruh Widyaiswara yang telah menyalurkan ilmunya dan memberi masukan terkait agenda dalam kegiatan aktualisasi;
5. Seluruh panitia penyelenggara pelatihan dasar CPNS Gelombang III Tahun 2026;
6. Rekan Kerja dan rekan pelatihan dasar CPNS Gelombang III Angkatan 16 Kelompok I untuk kebersamaan yang terjalin selama kegiatan belajar ini.

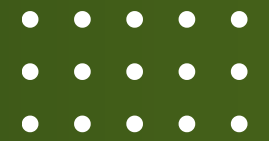


Penulis menyadari bahwa laporan ini hanya merupakan awal dari perjalanan panjang menuju perbaikan yang berkelanjutan. Penulis akan terus berusaha berkomitmen untuk meningkatkan diri, serta memberikan yang terbaik dalam setiap langkah.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

- ✓ Menjelaskan konsep dasar akuntansi lingkungan dan sosial.
- ✓ Memahami prinsip dan standar pelaporan keberlanjutan.
- ✓ Mengukur dan mengidentifikasi biaya lingkungan.
- ✓ Menganalisis penerapan akuntansi hijau dalam perusahaan.
- ✓ Mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja dan pasar.





BAB 1

PENDAHULUAN





Latar Belakang Akuntansi Sosial dan Lingkungan

Dalam paradigma akuntansi konvensional, tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak seperti investor, kreditor, dan manajemen. Namun, seiring meluasnya dampak aktivitas bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan, fokus akuntansi mulai bergeser. Dunia menyadari bahwa keputusan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi sosial dan ekologisnya. Dari sinilah lahir cabang baru yang disebut Akuntansi Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental Accounting).

Akuntansi sosial dan lingkungan berkembang sebagai respon terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemangku kepentingan yang lebih luas tidak hanya pemegang saham, tetapi juga masyarakat, pemerintah, dan alam. Konsep ini berakar pada pandangan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga memunculkan "biaya sosial dan lingkungan" yang perlu diukur serta diungkapkan secara transparan. Dengan demikian, akuntansi tidak lagi terbatas pada laporan laba rugi, tetapi juga menjadi sarana refleksi moral perusahaan terhadap kontribusinya bagi keberlanjutan hidup bersama.

Krisis Lingkungan dan Tanggung Jawab Bisnis

Perkembangan industri modern membawa kemajuan pesat dalam ekonomi global. Namun, di balik sisi positifnya, muncul berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran udara, limbah plastik, deforestasi, dan pemanasan global. Aktivitas bisnis, baik dalam skala kecil maupun besar, ikut memicu krisis ini melalui konsumsi sumber daya alam yang berlebihan dan produksi limbah yang sulit terurai. Akibatnya, keseimbangan ekosistem terganggu, dan dampaknya kembali dirasakan oleh manusia melalui bencana alam, degradasi lahan, serta krisis iklim yang semakin parah.

Dalam situasi ini, perusahaan tidak bisa lagi hanya berfokus pada pengembangan ekonomi. Masyarakat dan regulator kini menuntut “tanggung jawab sosial perusahaan” (Corporate Social Responsibility – CSR), yaitu komitmen organisasi untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. CSR tidak sekadar kegiatan filantropi, melainkan bagian strategis dari tata kelola perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan karyawan, komunitas, serta kelestarian lingkungan. Akuntansi kemudian berperan penting dalam mengukur serta melaporkan sejauh mana perusahaan menjalankan tanggung jawab tersebut kepada publik.



Urgensi Akuntansi Berkelanjutan

Akuntansi berkelanjutan berfungsi untuk menyediakan informasi yang komprehensif mengenai dampak aktivitas perusahaan dalam jangka panjang. Melalui pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting), manajemen dapat mengomunikasikan kebijakan dan kinerjanya terkait penggunaan energi, pengelolaan limbah, emisi karbon, serta program sosial kepada para pemangku kepentingan. Hal ini menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Selain itu, penerapan akuntansi berkelanjutan juga memperkuat reputasi perusahaan dan membantu menarik investor yang peduli terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance – ESG).

Perkembangan ini menunjukkan bahwa akuntansi kini memiliki peran strategis dalam mewujudkan bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Akuntan bukan lagi hanya "pencatat angka", tetapi juga "penjaga nilai" (guardian of value) yang memastikan keberlanjutan ekonomi berjalan seiring dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan.



PEOPLE



PLANET



PROFIT



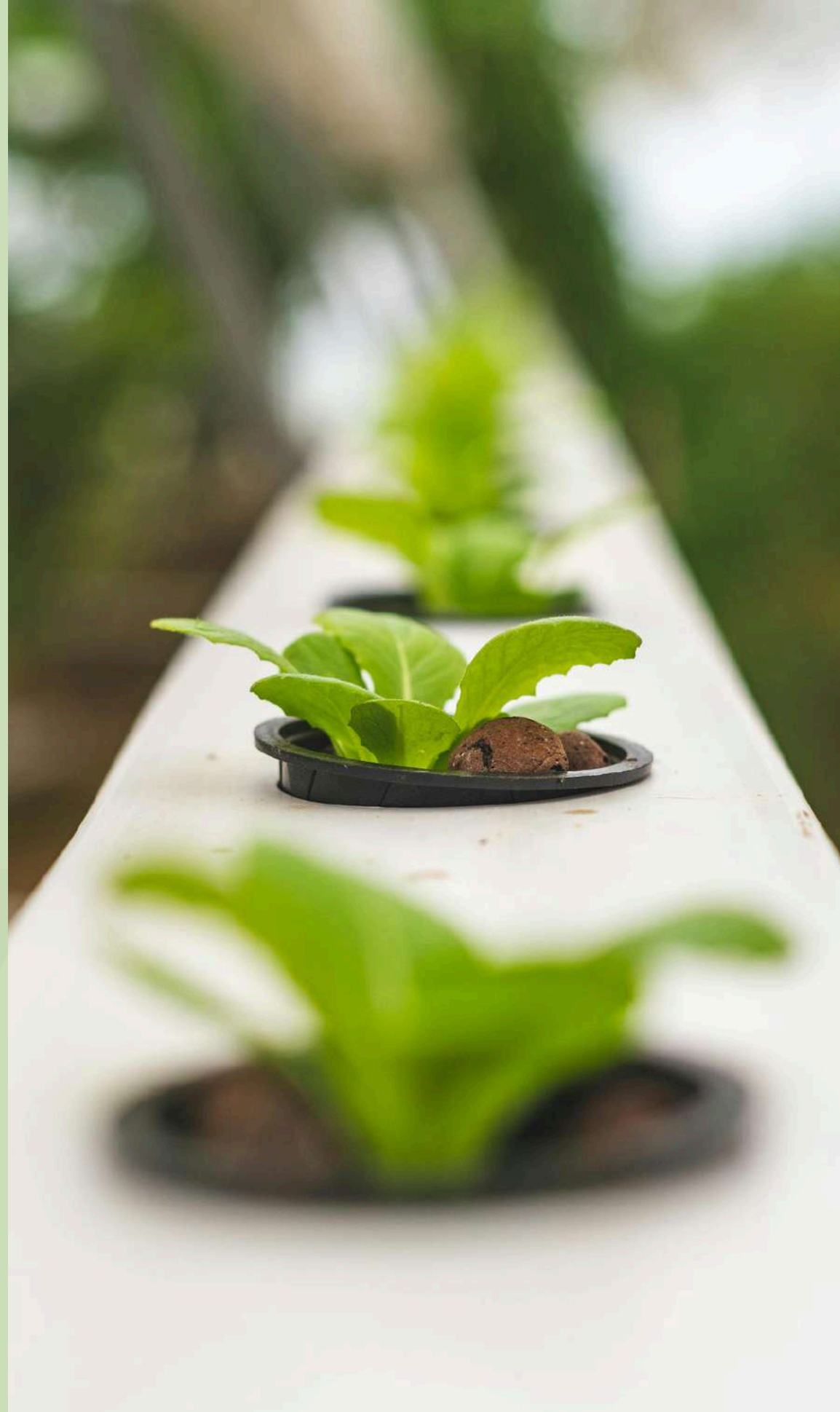
Tujuan dan Ruang Lingkup Mata Kuliah

Mata kuliah Akuntansi Sosial dan Lingkungan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman teoretis dan praktis mengenai bagaimana aktivitas organisasi berinteraksi dengan lingkungan sosial dan ekologisnya.

Ruang lingkup mata kuliah ini meliputi berbagai topik: prinsip dan konsep dasar akuntansi sosial-lingkungan, pengidentifikasian dampak sosial-ekologis kegiatan organisasi, metode pengukuran biaya eksternalitas lingkungan, serta penyusunan laporan keberlanjutan berbasis standar internasional seperti Global Reporting Initiative (GRI) atau Integrated Reporting (<IR>).

STUDI KASUS:

Sebagai contoh nyata, PT Unilever Indonesia Tbk secara konsisten menerbitkan Sustainability Report tahunan yang menjelaskan berbagai inisiatif keberlanjutan. Laporan tersebut memuat data rinci mengenai upaya pengelolaan limbah plastik, efisiensi penggunaan air, serta program pemberdayaan masyarakat di sekitar pabrik. Melalui langkah ini, Unilever menunjukkan komitmennya terhadap prinsip Triple Bottom Line dengan menyeimbangkan keuntungan finansial, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Praktik seperti inilah yang menjadi bukti bahwa akuntansi berkelanjutan bukan hanya idealisme, tetapi juga strategi yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan.



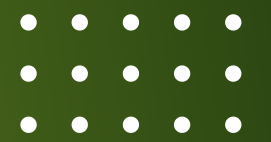
ESAI SINGKAT:

- Jelaskan dengan contoh nyata mengapa pelaporan keberlanjutan penting bagi perusahaan!
- Bagaimana peran akuntan dalam mendukung penerapan akuntansi berkelanjutan di organisasi?



BAB 2

KONSEP DASAR AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN



Pengertian Akuntansi Lingkungan dan Akuntansi Sosial

Akuntansi lingkungan merupakan cabang ilmu akuntansi yang berfokus pada pengukuran, pencatatan, dan pelaporan aktivitas organisasi yang berdampak terhadap lingkungan alam. Dalam praktiknya, akuntansi lingkungan menilai aspek-aspek seperti konsumsi energi, emisi karbon, pencemaran air, penggunaan bahan baku ramah lingkungan, hingga investasi dalam teknologi bersih. Informasi ini tidak hanya bermanfaat bagi pihak internal (manajemen), tetapi juga bagi pemerintah, masyarakat, dan investor yang ingin mengetahui sejauh mana sebuah perusahaan beroperasi secara berkelanjutan.

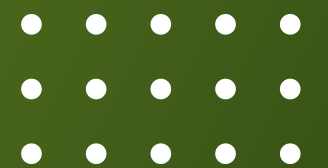


Sementara itu, akuntansi sosial adalah bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan aktivitas organisasi yang berhubungan dengan aspek sosial: kesejahteraan karyawan, kontribusi pada masyarakat, kepatuhan terhadap etika bisnis, hingga dampak sosial dari proses produksi. Akuntansi sosial bertujuan menilai sejauh mana organisasi berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan komunitas. Contohnya, pelaporan mengenai program pelatihan tenaga kerja lokal, pengembangan fasilitas masyarakat, penyediaan beasiswa, atau kegiatan pemberdayaan ekonomi. Semua itu merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang dapat diukur dan dilaporkan secara sistematis.

Perbedaan dengan Akuntansi Konvensional

Untuk memahami kekhasan akuntansi sosial dan lingkungan, penting membandingkannya dengan akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional berfokus pada pelaporan informasi finansial yang relevan bagi pihak internal dan investor, seperti laba, aset, pendapatan, dan beban. Informasi ini biasanya diukur dalam satuan moneter dan disusun menggunakan standar akuntansi keuangan (SAK/IFRS). Tujuan utamanya adalah menggambarkan posisi keuangan dan kinerja ekonomi suatu entitas.

Sebaliknya, akuntansi sosial dan lingkungan memperluas perspektif tersebut dengan memasukkan dimensi non-ekonomi. Informasi yang dihasilkan tidak hanya mencakup nilai uang, tetapi juga indikator sosial dan ekologis yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Contoh indikator sosial meliputi tingkat keselamatan kerja, tingkat kepuasan karyawan, dan kontribusi kepada komunitas, sedangkan indikator lingkungan dapat berupa jumlah emisi gas rumah kaca, volume air yang dihemat, atau luasan lahan yang direhabilitasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sosial dan lingkungan adalah bentuk evolusi dari akuntansi keuangan yang berupaya menghadirkan gambaran kinerja organisasi secara utuh tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari sisi keberlanjutan hidup manusia dan bumi.



Konsep Triple Bottom Line

Konsep Triple Bottom Line (TBL) diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1997 untuk menggeser paradigma keberhasilan bisnis dari fokus tunggal pada “laba” menuju keseimbangan antara tiga pilar utama: Profit (Keuntungan Ekonomi), People (Kesejahteraan Sosial), dan Planet (Kelestarian Lingkungan). Dalam konteks akuntansi sosial dan lingkungan, konsep TBL menjadi dasar dalam pelaporan berkelanjutan. Perusahaan tidak lagi cukup hanya menunjukkan laba bersih, tetapi juga harus melaporkan kontribusinya terhadap masyarakat dan upaya pelestarian lingkungan. Misalnya, peningkatan laba bersih harus dibarengi oleh kesejahteraan pegawai dan pengurangan limbah berbahaya.

Implementasi TBL juga mendorong kebijakan bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab. Melalui model ini, perusahaan dapat menganalisis dampak setiap keputusan dari tiga sisi: apakah menguntungkan secara ekonomi, adil secara sosial, dan ramah terhadap lingkungan. Ketiga aspek ini saling berhubungan dan membentuk kerangka akuntabilitas baru dalam dunia bisnis global. Dalam jangka panjang, penerapan TBL bukan hanya memperkuat reputasi perusahaan, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan generasi mendatang.



Studi Kasus

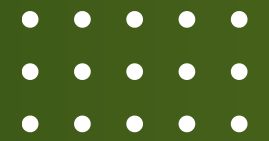


Sebagai ilustrasi, Bank Negara Indonesia (BNI) telah mengembangkan laporan keberlanjutan (Sustainability Report) yang disusun berdasarkan pedoman Global Reporting Initiative (GRI). Dalam laporan tersebut, BNI melaporkan berbagai program sosial seperti pembinaan usaha mikro dan pelatihan wirausaha bagi masyarakat desa sekaligus memaparkan kinerjanya dalam menjaga efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon di unit-unit kerja. Contoh ini menunjukkan penerapan nyata dari prinsip Triple Bottom Line, yaitu keberhasilan bisnis yang diukur tidak hanya dari kinerja keuangan, tetapi juga dari manfaat sosial dan dampak lingkungannya.

Esai Singkat

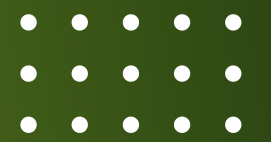
- ✓ Jelaskan mengapa konsep Triple Bottom Line penting diterapkan dalam dunia bisnis modern!
- ✓ Berikan dua contoh aktivitas perusahaan yang mencerminkan penerapan akuntansi sosial dan lingkungan!





BAB 3

PRINSIP DAN KERANGKA KONSEPTUAL



Prinsip-Prinsip Akuntansi Hijau

Akuntansi hijau (Green Accounting) merupakan pendekatan akuntansi yang berfokus pada integrasi faktor lingkungan ke dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan organisasi. Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa aktivitas bisnis tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekologis yang harus diperhitungkan secara sistematis. Prinsip-prinsip dasar akuntansi hijau mencakup beberapa hal penting. **Pertama**, pengakuan dan pengukuran dampak lingkungan sebagai bagian dari biaya perusahaan. Setiap kegiatan yang menyebabkan polusi, limbah, atau kerusakan lingkungan perlu dikonversi ke dalam nilai moneter agar tercermin dalam laporan keuangan. **Kedua**, penerapan prinsip tanggung jawab ekologis, yaitu pengakuan bahwa organisasi bertanggung jawab atas pemulihan atau pencegahan kerusakan yang ditimbulkan kegiatan operasionalnya. **Ketiga**, transparansi dalam pelaporan, yang menuntut perusahaan mengungkapkan informasi terkait kebijakan dan kinerja lingkungan secara terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan.





Kerangka Konseptual Dasar

Kerangka konseptual dalam akuntansi sosial dan lingkungan berfungsi sebagai landasan normatif yang memandu praktik, pelaporan, dan penilaian tanggung jawab sosial-ekologis perusahaan. Secara umum, kerangka ini dibangun di atas gagasan bahwa informasi akuntansi harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Namun, dalam konteks sosial dan lingkungan, karakteristik tersebut diperluas dengan mempertimbangkan nilai moral dan keberlanjutan. Beberapa komponen utama kerangka konseptual akuntansi sosial dan lingkungan antara lain:

Objektif pelaporan: menyediakan informasi mengenai interaksi organisasi dengan lingkungan sosial dan alam untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi dan etis.

Unit analisis: tidak hanya mencakup entitas ekonomi (perusahaan), tetapi juga konteks sosial dan ekologis tempat organisasi beroperasi.

Elemen pelaporan: termasuk biaya lingkungan, aset ekologis (seperti hutan atau air), kewajiban sosial, dan indikator non-keuangan seperti tingkat emisi atau kontribusi sosial.

Basis pengukuran: menggunakan kombinasi pengukuran kuantitatif dan kualitatif. Misalnya, selain nilai moneter, juga digunakan indikator fisik seperti ton limbah, liter air bersih, atau jumlah tenaga kerja lokal yang diberdayakan.



Hubungan dengan Etika Bisnis dan Akuntansi Konservatif

Prinsip akuntansi sosial dan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari etika bisnis, karena keduanya berlandaskan pada nilai tanggung jawab dan integritas. Etika bisnis berperan sebagai kompas moral bagi perusahaan dalam mengambil keputusan yang tidak hanya legal, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat serta lingkungan.

Akuntansi berkelanjutan menuntut akuntan untuk bertindak secara etis, jujur, dan independen dalam menyajikan data. Misalnya, jika sebuah perusahaan melaporkan data lingkungan yang tidak akurat demi citra positif, maka hal tersebut melanggar integritas profesi dan merusak kepercayaan publik. Di sinilah pentingnya sikap profesional dan kode etik akuntan bahwa kebenaran informasi adalah tanggung jawab moral, bukan sekadar teknis.

Selanjutnya, konsep ini juga memiliki keterkaitan dengan akuntansi konservatif. Dalam akuntansi keuangan tradisional, prinsip konservatisme mengajarkan agar akuntan berhati-hati dengan mengakui potensi kerugian lebih cepat daripada potensi keuntungan. Dalam konteks lingkungan, prinsip ini dapat diterapkan dengan cara memperhitungkan dampak lingkungan yang mungkin timbul sebelum benar-benar terjadi. Misalnya, ketika perusahaan memperkirakan potensi biaya akibat pencemaran, maka lebih bijak untuk mengakui dan menyisihkan cadangan biaya pemulihan sejak dini. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian serta tanggung jawab moral dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dan ekologi.

STUDI KASUS:

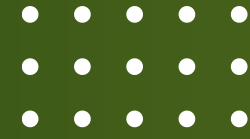
PT Pertamina (Persero) menjadi salah satu perusahaan di Indonesia yang telah mengintegrasikan prinsip akuntansi hijau dalam strategi bisnisnya. Dalam laporan keberlanjutannya, Pertamina secara transparan mencatat besarnya emisi CO₂ yang dihasilkan tiap tahun, investasi untuk energi terbarukan, serta alokasi dana untuk rehabilitasi wilayah terdampak eksplorasi minyak dan gas. Selain itu, perusahaan juga menetapkan standar etika bisnis ketat (Code of Conduct) yang menuntut seluruh karyawan menjaga integritas dan kepatuhan terhadap nilai keberlanjutan.

Praktik ini menunjukkan penerapan prinsip Triple Bottom Line dan akuntansi konservatif secara bersamaan: perusahaan tidak hanya menjaga kinerja ekonomi, tetapi juga mengantisipasi risiko lingkungan dengan pendekatan kehati-hatian dan tanggung jawab sosial.



ESAI SINGKAT:

- Jelaskan bagaimana prinsip konservatisme dapat diterapkan dalam konteks akuntansi lingkungan!
- Mengapa akuntan perlu memegang nilai etika dalam menyusun laporan keberlanjutan perusahaan?



BAB 4

STANDAR DAN INSTITUSI GLOBAL



STANDAR PELAPORAN KEBERLANJUTAN INTERNASIONAL

Pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) merupakan sarana bagi perusahaan untuk mengomunikasikan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan secara transparan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Agar informasi yang disajikan dapat dibandingkan dan dipercaya secara global, diperlukan standar atau pedoman yang disepakati secara internasional.



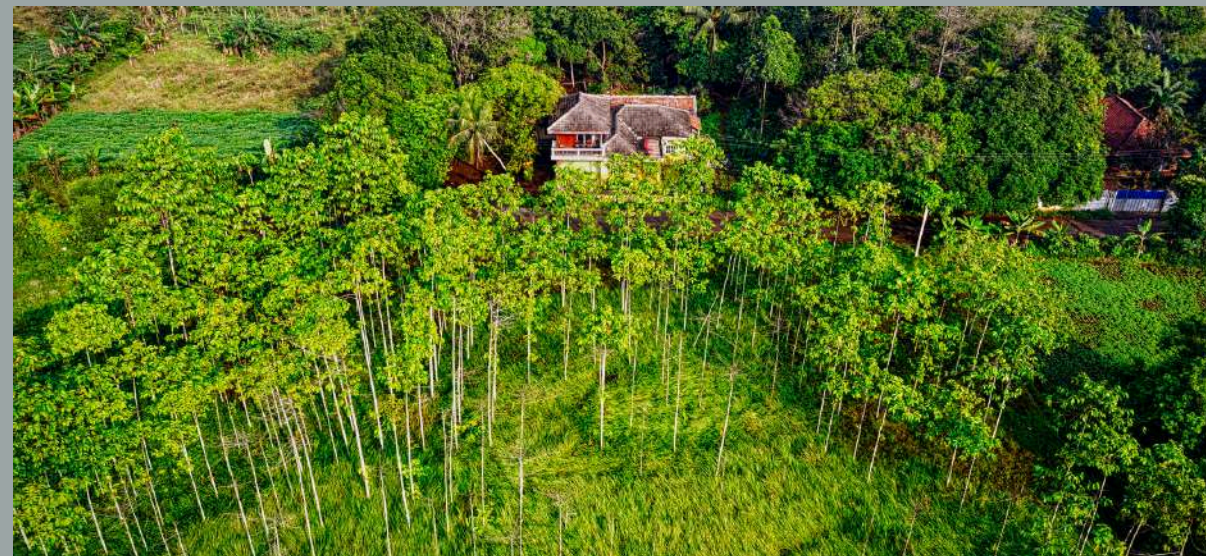
Global Reporting Initiative (GRI)

GRI menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk mengungkapkan data keberlanjutan secara sistematis. Standar GRI mencakup tiga pilar utama ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan indikator spesifik untuk masing-masing bidang, seperti emisi karbon, pengelolaan limbah, keselamatan kerja, dan dampak ekonomi lokal.



Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

SASB membantu perusahaan menentukan isu-isu lingkungan dan sosial yang paling material bagi sektor usahanya. Misalnya, industri pertambangan menyoroti manajemen limbah dan keselamatan kerja, sementara sektor finansial lebih menekankan pembiayaan hijau dan tata kelola risiko sosial.



International Sustainability Standards Board (ISSB)

ISSB bertujuan untuk menyusun standar global tunggal yang dapat menyatukan pelaporan keuangan dan keberlanjutan agar lebih konsisten dan terintegrasi. Hal ini memperkuat arah bahwa pelaporan sosial dan lingkungan kini menjadi bagian penting dari pelaporan korporasi modern bukan sekadar pelengkap.



Peran Lembaga Global

United Nations (UN)

mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk berkomitmen pada sepuluh prinsip utama tentang hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, dan anti-korupsi.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

mengeluarkan Guidelines for Multinational Enterprises yang berisi prinsip-prinsip tanggung jawab perusahaan multinasional terhadap masyarakat dan lingkungan di tempat mereka beroperasi.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

berperan sebagai wadah kolaborasi antarperusahaan besar dunia untuk menciptakan inovasi berkelanjutan.

IFRS Foundation

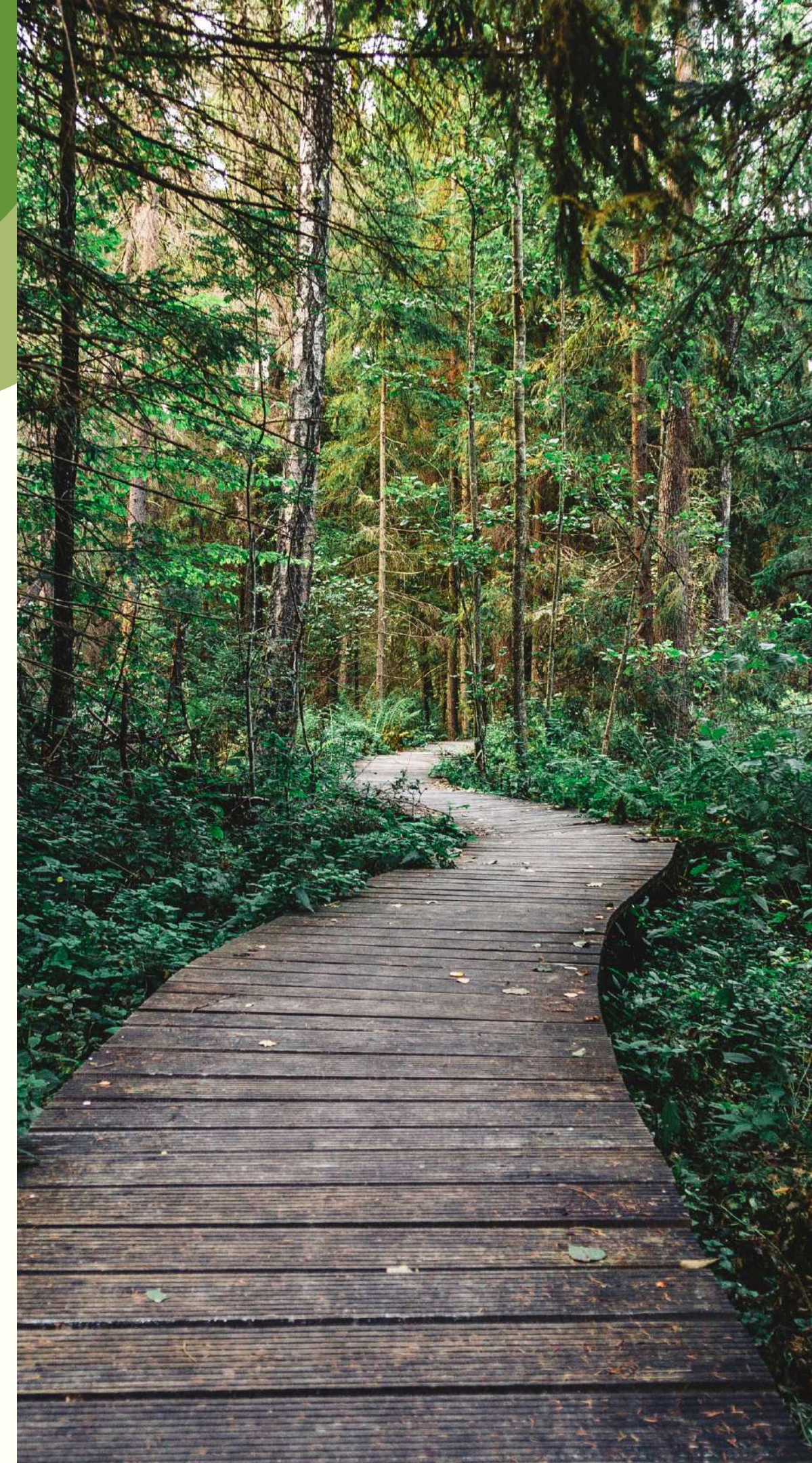
berperan dalam integrasi penuh antara pelaporan keuangan dan non-keuangan agar para investor dapat menilai risiko dan peluang lingkungan secara lebih akurat.

Kolaborasi antar lembaga global ini memperkuat ekosistem transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis. Mereka tidak hanya mengatur, tetapi juga mengedukasi dan memotivasi dunia usaha untuk bergerak menuju ekonomi hijau yang berkeadilan.

Regulasi Di Indonesia

Di Indonesia, kesadaran mengenai pentingnya pelaporan sosial dan lingkungan mulai meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah dan dorongan publik terhadap tanggung jawab sosial korporasi. Regulasi utama terkait hal ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, yang mewajibkan perusahaan berbasis sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kebijakan ini menandai langkah penting bahwa keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban hukum bagi perusahaan.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan (sustainability report) setiap tahunnya. POJK ini mendorong integrasi aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST/ESG) dalam kegiatan usaha. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menjalankan Program PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang menilai kinerja lingkungan perusahaan dengan peringkat warna: emas (unggul), hijau (baik), biru (patuh), merah (buruk), dan hitam (sangat buruk). Program ini menumbuhkan budaya transparansi lingkungan di kalangan industri Indonesia.



Studi Kasus:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi salah satu perusahaan yang secara konsisten menerbitkan Sustainability Report berdasarkan pedoman GRI Standards dan ketentuan POJK No. 51/2017. Dalam laporan tersebut, BRI memaparkan berbagai program keberlanjutan seperti pembiayaan hijau (green financing), pengurangan emisi kantor cabang, serta program pemberdayaan UMKM di pedesaan. Laporan ini tidak hanya memperlihatkan tanggung jawab sosial, tetapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi strategis untuk meningkatkan kepercayaan investor dan publik. Kasus ini menggambarkan bahwa penerapan standar global yang dikombinasikan dengan regulasi nasional mampu mendorong praktik bisnis yang transparan, terpercaya, dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

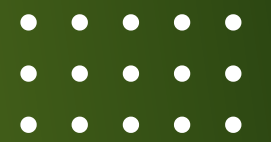
Esai Singkat

- Jelaskan perbedaan fokus antara standar GRI dan SASB dalam pelaporan keberlanjutan!
- Bagaimana peran pemerintah Indonesia melalui POJK dan PROPER dalam mendorong praktik akuntansi lingkungan yang transparan?



BAB 5

INSTRUMEN DAN METODE PENGUKURAN



Identifikasi Biaya Lingkungan

Dalam konteks akuntansi sosial dan lingkungan, biaya lingkungan mencakup semua pengeluaran yang timbul akibat aktivitas organisasi yang berdampak pada ekosistem. Biaya ini tidak hanya terkait dengan kerusakan fisik yang terjadi, tetapi juga dengan upaya pencegahan, mitigasi, dan pemulihan. Oleh karena itu, proses identifikasi biaya lingkungan menjadi langkah awal yang sangat penting agar organisasi dapat menilai tanggung jawab ekologisnya secara akurat.

Biaya Pencegahan

biaya yang dikeluarkan untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan

Biaya deteksi

biaya yang digunakan untuk memantau dan mengukur tingkat pencemaran atau limbah, misalnya biaya audit lingkungan atau uji laboratorium.

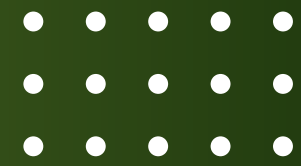
Biaya Kerusakan

biaya yang timbul akibat dampak negatif yang sudah terjadi, seperti ganti rugi kepada masyarakat terdampak

Biaya Pemulihan

pengeluaran yang terkait dengan program rehabilitasi ekosistem, reklamasi tambang, atau pembersihan limbah berbahaya

Pengukuran Dampak Sosial



Selain aspek lingkungan, perusahaan juga menanggung tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan pemangku kepentingannya. Pengukuran dampak sosial adalah proses untuk menilai seberapa besar efek kegiatan bisnis terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan manusia. Pengukuran ini meliputi baik dampak positif seperti penciptaan lapangan kerja dan pelatihan Masyarakat maupun dampak negatif, seperti ketimpangan sosial atau gangguan terhadap budaya lokal.

Dalam praktiknya, ada beberapa metode yang digunakan untuk mengukur dampak sosial:

Social Return on Investment (SROI)

metode kuantitatif yang membandingkan nilai sosial yang dihasilkan program dengan investasi yang telah dikeluarkan.



Social Accounting and Audit (SAA):

pendekatan yang mirip dengan audit keuangan, tetapi fokusnya pada aktivitas sosial meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program tanggung jawab sosial.



Impact Measurement Framework

alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi output, outcome, dan impact suatu kegiatan, dari perubahan perilaku masyarakat hingga peningkatan kualitas hidup yang lebih luas.



Pengungkapan dalam Laporan

Setelah biaya lingkungan dan dampak sosial diidentifikasi serta diukur, langkah berikutnya adalah pengungkapan (disclosure) dalam laporan. Pengungkapan berfungsi untuk memberikan informasi transparan kepada publik mengenai bagaimana perusahaan mengelola tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Dalam pelaporan keberlanjutan, pengungkapan umumnya tertuang dalam Sustainability Report atau laporan terintegrasi (Integrated Report) yang memadukan informasi keuangan dan non-keuangan. Format pelaporan ini biasanya mengacu pada GRI Standards atau pedoman International Sustainability Standards Board (ISSB) agar dapat dibandingkan secara global. Beberapa prinsip penting dalam pengungkapan meliputi:

- > **Kelengkapan (completeness):** mencakup seluruh aktivitas yang berdampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat.
- > **Keseimbangan (balance):** tidak hanya mengungkapkan keberhasilan, tetapi juga tantangan atau dampak negatif yang masih dihadapi.
- > **Keterbandingan (comparability):** menyajikan data dalam format yang memungkinkan perbandingan antarperiode atau antarperusahaan.
- > **Keandalan (reliability):** informasi harus didukung bukti empiris, audit internal, atau verifikasi pihak ketiga.



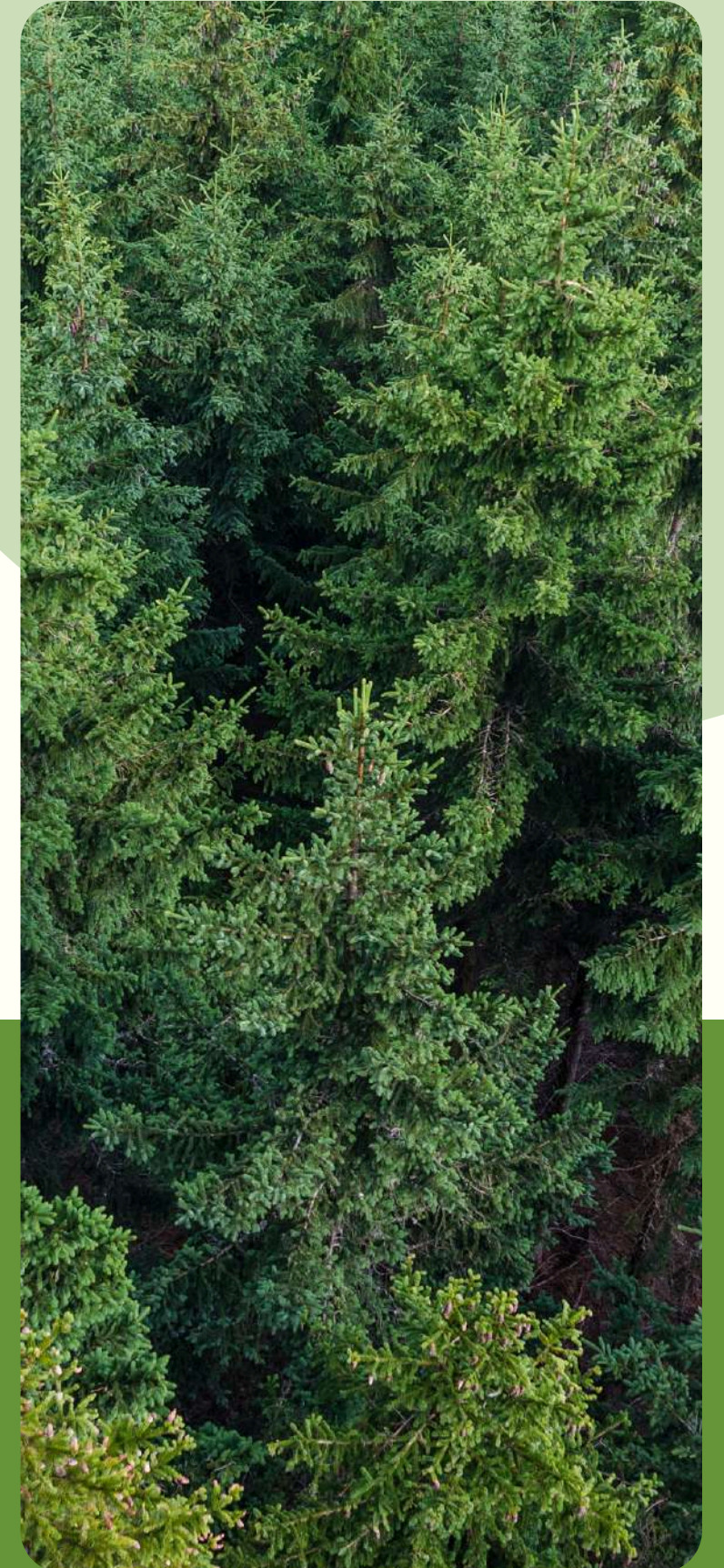
Studi Kasus

PT Vale Indonesia Tbk, sebagai salah satu perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia, telah menerapkan sistem identifikasi biaya lingkungan secara menyeluruh. Dalam laporan keberlanjutannya, Vale mencatat biaya rehabilitasi lahan pascatambang, program revegetasi hutan, dan biaya kompensasi sosial kepada masyarakat sekitar. Selain itu, perusahaan juga menggunakan pendekatan Social Return on Investment (SROI) untuk mengukur dampak ekonomi program pendidikan dan pelatihan bagi warga lokal. Hasil pengukuran tersebut diungkap secara rinci dalam Sustainability Report tahunan sesuai GRI Standards. Melalui pendekatan ini, Vale tidak hanya memperlihatkan kinerja finansial, tetapi juga menunjukkan nilai sosial dan ekologis yang diciptakan bagi masyarakat dan lingkungan.

Esai Singkat

Jelaskan perbedaan antara biaya pencegahan dan biaya remediasi lingkungan beserta contohnya!

Mengapa transparansi dalam pengungkapan laporan sosial dan lingkungan menjadi penting bagi reputasi perusahaan?



BAB 6

AKUNTANSI HIJAU



Pengertian Akuntansi Hijau

Perkembangan akuntansi hijau tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya perhatian global terhadap kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam. Sistem akuntansi konvensional dinilai memiliki keterbatasan karena hanya menekankan pada pencatatan transaksi ekonomi dan keuntungan finansial, sementara dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis sering diabaikan.

Dalam praktiknya, laporan keuangan tradisional hanya memberikan informasi mengenai kinerja ekonomi korporasi tanpa memperhitungkan kerusakan lingkungan atau dampak sosial yang timbul akibat kegiatan bisnis. Hal ini dapat menyebabkan keputusan bisnis yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, muncul konsep Akuntansi Hijau (green accounting) sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam sistem akuntansi.

Akuntansi Hijau merupakan paradigma baru dalam akuntansi yang menganjurkan bahwa fokus dari proses akuntansi tidak hanya tertuju pada transaksi, peristiwa, atau objek keuangan, tetapi juga pada objek, transaksi, atau peristiwa sosial dan lingkungan. Pemahaman tersebut merujuk pada teori atau model tiga pilar dasar dari bisnis yang digagas oleh Elkington pada tahun 1997 dan 2001.

Pengertian Akuntansi Hijau

Berdasarkan teori tiga pilar dasar Elkington, Akuntansi hijau memiliki tiga pilar dasar, yaitu:

- Pilar pertama adalah akuntansi lingkungan, yaitu proses transaksi, peristiwa, atau objek lingkungan untuk menghasilkan informasi akuntansi lingkungan.
- Pilar kedua adalah akuntansi sosial, yaitu proses akuntansi yang mengakui, mengukur nilai, mencatat, meringkas, dan melaporkan informasi akuntansi terkait transaksi atau peristiwa sosial-masyarakat dari suatu entitas untuk menghasilkan informasi akuntansi sosial.
- Pilar ketiga adalah akuntansi keuangan, yaitu proses akuntansi yang mengakui, mengukur nilai, mencatat, meringkas, dan melaporkan transaksi atau peristiwa keuangan dari suatu entitas untuk menghasilkan informasi keuangan.

Agenda Penghijauan Akuntansi

Setidaknya terdapat empat agenda utama yang harus dilakukan korporasi dan akuntan untuk menghijaukan akuntansi di masa depan.

Pengembangan standar akuntansi hijau

Mengembangkan konsep, prinsip, dan standar akuntansi berbasis ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terintegrasi.

Akuntabilitas Korporasi (GAR)

Mendorong pelaporan terintegrasi melalui *Green Accounting Reporting (GAR)* untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan.

Transparansi dan pengungkapan informasi

Mengembangkan modal pelaporan yang transparan, jujur, dan reliabel bagi perusahaan.

Penghijauan akuntan

Penghijauan akuntansi tidak akan berjalan efektif jika tidak dibarengi dengan penghijauan akuntan. Alasannya karena akuntan memegang peranan strategis, taktis, dan operasional dalam proses akuntansi dan proses pengambilan keputusan para pihak.





Ada tiga alasan mengapa akuntan harus ikut dihijaukan, yaitu:

1.

Moral dan etika.

Akuntan harus menjunjung tinggi etika dengan menyajikan informasi keuangan, sosial, dan lingkungan secara jujur dan utuh untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

2.

Profesional.

Akuntan memiliki tanggung jawab profesional yang menyajikan informasi akuntansi yang komprehensif, jujur, relevan, dan reliabel agar tidak menyesatkan pengambilan keputusan.

3.

Pragmatis atau ekonomik.

Akuntan perlu menyediakan informasi akuntansi yang lengkap, termasuk aspek sosial dan lingkungan agar mendukung pengambilan keputusan ekonomi dan manajerial yang tepat.



Penghijauan terhadap paradigma akuntan dalam upaya penghijauan akuntansi juga menjadi sangat penting dan mendesak. Untuk itu proses edukasi, pelatihan, dan pengembangan Akuntansi Hijau kepada akuntan, baik melalui pendidikan di perguruan tinggi maupun organisasi profesi akuntan dan organisasi korporasi menjadi penting untuk segera dilakukan.

SOAL



Jelaskan konsep akuntansi hijau (green accounting) serta keterkaitannya dengan tiga pilar utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan)! Selanjutnya, analisis bagaimana prinsip-prinsip akuntansi hijau dapat membantu perusahaan dalam menghasilkan informasi yang lebih relevan dan mendukung pengambilan keputusan yang berkelanjutan?

BAB 7

IMPLEMENTASI DALAM PERUSAHAAN



Penerapan Akuntansi Lingkungan

o o o o

Konstruksi pertama berkaitan dengan aplikasi akuntansi terhadap biaya-manfaat dari pengorbanan sumber daya ekonomi untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial-lingkungan (TJSL/CSR) yang bersifat wajib maupun sukarela dan program bisnis hijau atau korporasi hijau. Konstruksi kedua berkaitan dengan identifikasi terhadap biaya lingkungan dan biaya sosial yang termasuk dalam kelompok green costs perlakuan akuntansi dan analisis dampaknya dalam perspektif Akuntansi Hijau, berikut uraiannya.



o o o o

Perlakuan Akuntansi terhadap Biaya-Manfaat TJSLP/CSR dan Korporasi Hijau

Untuk memberikan gambaran konkret tentang konstruksi praktik Akuntansi Hijau berkenaan dengan perlakuan akuntansi terhadap biaya-manfaat dari pengorbanan sumber daya ekonomi entitas untuk melaksanakan program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan (TJSLP/CSR), baik yang bersifat wajib atau sukarela, maupun melaksanakan program-program bisnis hijau dan korporasi hijau, dirumuskan dan diuraikan dalam Tabel 7.1



Tabel 7.1

Perlakuan Akuntansi terhadap Biaya-Biaya (Costs) TJSLP/CSR dan Korporasi Hijau dan Perspektif Akuntansi Keuangan Konservatif dan Akuntansi Hijau ...

Uraian	Akuntansi Keuangan Konservatif	Akuntansi Hijau
Pengakuan	Kebanyakan diakui sebagai beban periodik (<i>expense</i>) karena menganggap manfaat ekonominya di masa datang tidak dapat dipastikan.	Kebanyakan diakui sebagai investasi sosial-lingkungan atau investasi hijau karena diyakini memiliki manfaat ekonomi di masa datang yang cukup pasti.
Pengukuran nilai	Nilai pengorbanan <i>costs</i> -nya pasti, sementara nilai manfaat ekonominya masa datangnya (<i>future economic benefits</i>) tidak pasti dan sulit diukur.	Nilai pengorbanan dan nilai manfaat ekonomi-nonekonominya di masa datang cukup pasti dan dapat diukur antar-periode.
Pencatatan, peringkasan dan pelaporan informasi akuntansi	Dicatat sebagai biaya periodik yang mengurangi nilai aset dan dilaporkan sebagai biaya atau beban periodik dalam Laporan Laba Rugi.	Dicatat sebagai investasi sosial-lingkungan atau investasi hijau yang tidak mengurangi nilai aset, serta tak berkaitan dengan beban periodik dalam Laporan Laba/rugi. Hanya untuk <i>costs</i> TJSL/CSR dan korporasi hijau yang tidak memenuhi "Definisi Aset" yang dapat langsung diperlakukan sebagai beban periodik dalam Laporan Laba Rugi.
Valuasi dampak periodik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menurunkan nilai aset, menaikkan biaya periodik, dan menurunkan laba, pajak dan ekuitas pemilik, serta meningkatkan risiko finansial dan risiko pasar. 2) Korporasi enggan melakukan TJSL/CSR dan bisnis hijau atau berupaya meminimumkan aktivitas TJSL/CSR dan korporasi hijau karena dinilai membebani dan merugikan. 3) Korporasi akan memasukkan komponen biaya TJSL/CSR dan korporasi hijau dalam penentuan harga jual produk/jasa yang akan dibebankan kepada pelanggan atau konsumen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak menurunkan nilai aset, laba, pajak dan ekuitas pemilik. 2) Korporasi terpacu melakukan meningkatkan program-program dan aktivitas TJSL/CSR dan korporasi hijau untuk meningkatkan reputasi dan nama baik, meminimalkan risiko bisnis, memperluas akses keuangan dan pangsa pasar. 3) Meningkatkan pendapatan, laba, ekuitas pemilik dan nilai aset, serta nilai pasar sekuritas entitas. 4) Korporasi tidak memasukan <i>costs</i> TJSL/CSR dan korporasi hijau dalam penentuan harga jual produk/jasa, kecuali untuk biaya TJSL/CSR dan biaya korporasi hijau yang bersifat periodik. 5) Memperkuat keberlanjutan pertumbuhan bisnis dan laba korporasi dalam jangka panjang.



Perlakuan akuntansi terhadap biaya program CSR, TJSLP, dan aktivitas hijau menunjukkan perbedaan signifikan antara akuntansi keuangan konvensional dan akuntansi hijau, yang berdampak pada nilai aset, beban, laba, dan ekuitas perusahaan. Pendekatan akuntansi hijau dinilai lebih unggul karena mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan rasional terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga lebih mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan manajerial dan investasi. Perbedaan ini juga terlihat dalam penilaian terhadap *green cost-benefit* dan dampak eksternalitas, yang dalam akuntansi hijau dipertimbangkan secara lebih menyeluruh, sebagaimana ilustrasikan dalam contoh kasus perkebunan kelapa sawit.

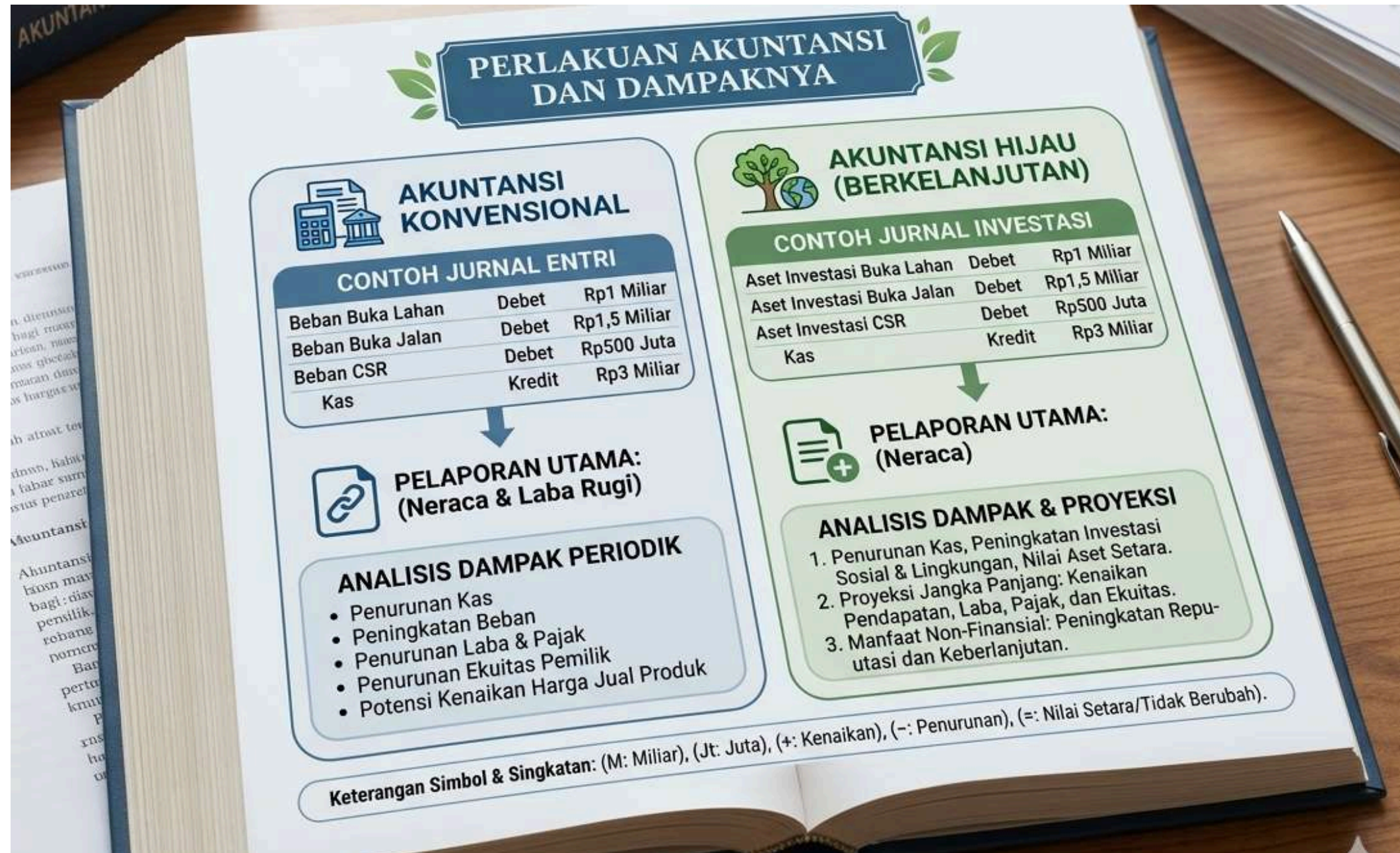


CONTOH KASUS PT. A

PT. A mengalokasikan dana sebesar Rp 3 miliar dengan rincian Rp 1 miliar dialokasikan ke penebangan lahan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit, Rp 1,5 miliar untuk pembukaan jalan menuju perkebunan, dan Rp 500 juta untuk dana CSR bagi masyarakat dan pemerintah setempat.

Gambar 7.1

Dampak positif negatif perlakuan akuntansi terhadap biaya TJSL/CSR menurut akuntansi konvensional dan akuntansi hijau.



(Sumber: Lako 2017)





Dari deskripsi Gambar 7.1 terlihat bahwa akibat dari perlakuan akuntansi konvensional yang konservatif terhadap biaya-biaya TJSL/CSR, maka pengorbanan kas sebesar Rp3 miliar diperlakukan dan dicatat sebagai beban periodik dan dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi. Dampak negatif dari perlakuan tersebut adalah kas berkurang (-), beban periodik meningkat (+), laba menurun (-), dan jumlah pajak untuk negara juga berkurang (-), serta nilai ekuitas pemilik berkurang (-). Dampak negatif selanjutnya adalah PT A akan memasukkan biaya TJSL/CSR tersebut ke dalam komponen penentuan harga jual produknya sehingga akan membebani konsumen.





Perlakuan biaya sebagai beban periodik dapat menurunkan kinerja keuangan sehingga direksi berisiko dianggap gagal dan enggan menerapkan praktik bisnis hijau. Akibatnya, perusahaan cenderung memilih cara yang lebih murah seperti pembakaran lahan, meskipun berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.

Dalam perspektif akuntansi hijau, biaya TJSL/CSR diperlakukan sebagai investasi lingkungan dan sosial sehingga dicatat sebagai aset dan tidak mengurangi nilai total aset perusahaan. Selain itu, perlakuan ini tidak memengaruhi laba, ekuitas, maupun pajak, sehingga tidak membebani konsumen.





Perlakuan akuntansi hijau meningkatkan citra, reputasi, dan kepercayaan pemerintah serta masyarakat terhadap perusahaan. Hal ini menurunkan berbagai risiko dan memperkuat keberlanjutan serta peluang ekspansi bisnis di masa depan.

Semua dampak positif tersebut pada akhirnya akan berdampak positif pada meningkatnya pangsa pasar, penjualan, efisiensi biaya produksi dan operasional, laba, nilai ekuitas pemilik, dan nilai aset perusahaan untuk periode selanjutnya. PT A juga akan diakui sebagai "warga negara korporasi" yang baik karena membayar pajak dalam jumlah yang wajar dan terus meningkat. Keberlanjutan pertumbuhan bisnis, laba, nilai ekuitas pemilik, dan aset perusahaan bisa semakin pesat apabila PT semakin peduli pada TJSL/CSR dan gerakan korporasi hijau.



Integrasi dalam Laporan Keuangan

Secara umum, biaya hijau adalah biaya yang timbul karena entitas korporasi melaksanakan tanggung jawab bisnis, tanggung jawab lingkungan, dan tanggung jawab sosial yang bersifat wajib maupun sukarela dalam operasi usaha atau bisnis. Secara khusus, biaya hijau dapat digolongkan ke dalam empat kategori yaitu:

**Biaya
Regulasi**

**Biaya
Kontijen**

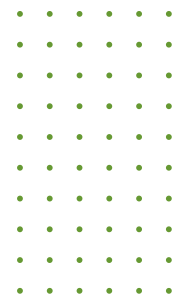
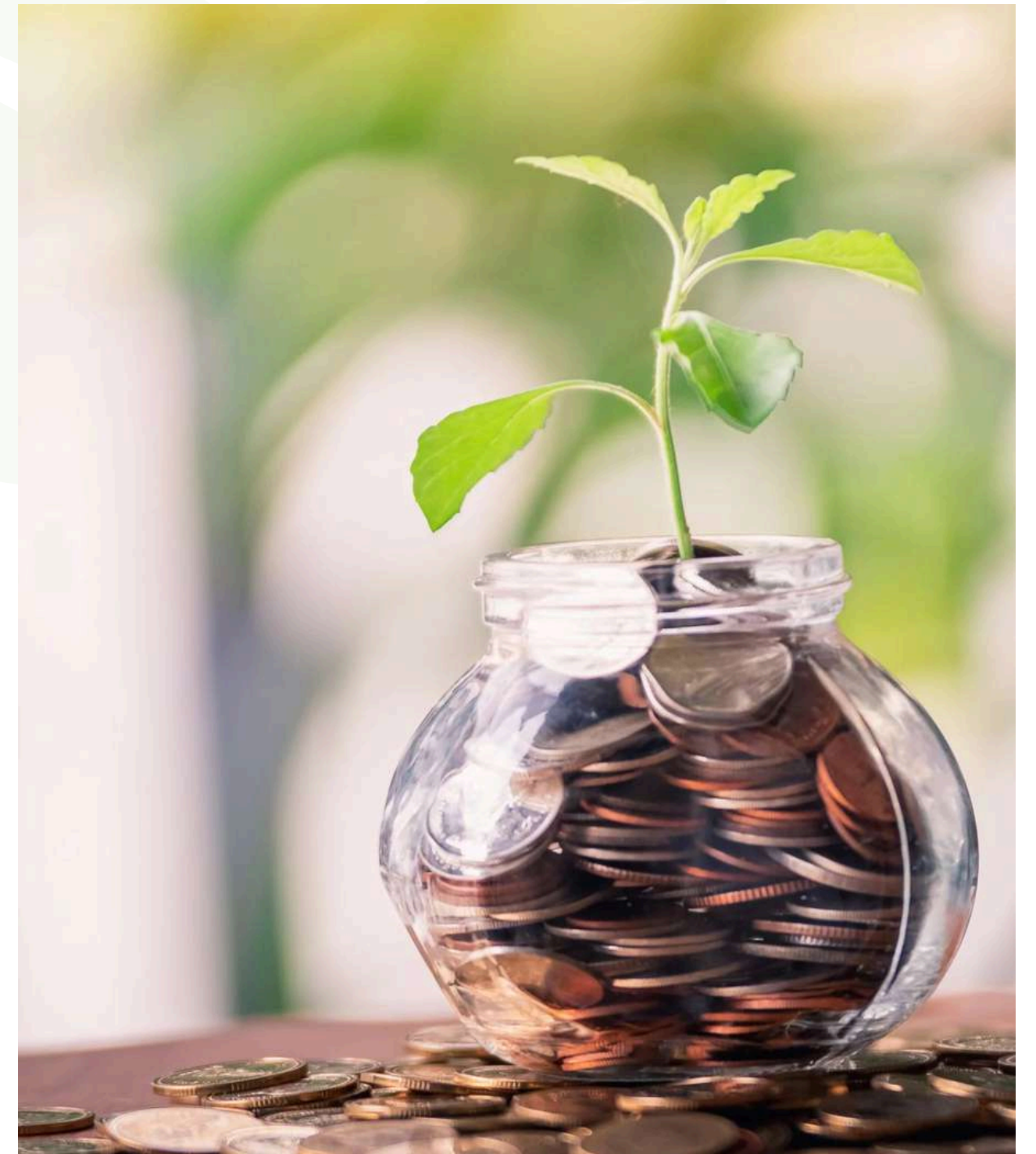
**Biaya
Relasional**

**Biaya
Donasi**

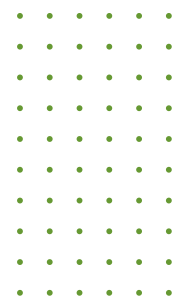
BIAYA REGULASI

Biaya regulasi adalah biaya yang timbul karena korporasi diwajibkan oleh regulasi dari pemerintah, lembaga tertentu, dan komunitas masyarakat setempat untuk bertanggung jawab melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSLP) yang telah diatur dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan regulasi-regulasi lainnya seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Biaya regulasi mencakup berbagai pengeluaran seperti AMDAL, konstruksi, pengelolaan limbah, pengendalian polusi, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan yang umumnya diperlakukan sebagai beban periodik sehingga menurunkan laba dan ekuitas, terutama pada tahap awal operasi perusahaan. Namun, dalam perspektif akuntansi hijau, sebagian biaya tersebut seharusnya diakui sebagai investasi karena memiliki manfaat jangka panjang, sehingga perlakuan yang keliru dapat menyebabkan nilai aset, laba, dan ekuitas perusahaan menjadi understated.



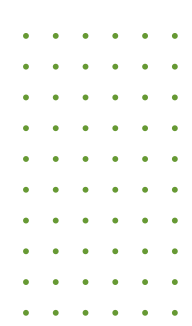
Sebagai contoh, PT ABC yang bergerak dalam industri pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) membangun PLTU di daerah Z dengan nilai investasi Rp10 triliun (selain biaya-biaya utama untuk investasi lahan, bangunan pabrik, mesin, dan aset-aset lain yang berkaitan dengan investasi dan operasi PLTU). Pada tahap prakonstruksi dan konstruksi PT ABC mengeluarkan biaya untuk membuka akses jalan menuju pabrik sebesar Rp10 miliar, biaya pengolahan dan pembuangan limbah sebesar Rp8 miliar, biaya penghijauan lingkungan sebesar Rp2 miliar, bantuan permodalan untuk pengembangan usaha kecil dan mikro (UKM) masyarakat sebesar Rp500 juta, biaya bantuan sosial-keagamaan untuk masyarakat sekitar Rp1 miliar, bantuan CSR untuk pengentasan kemiskinan kepada pemerintah daerah setempat sebesar Rp2 miliar, dan bantuan beasiswa pendidikan anak-anak SMP dan SMU kepada masyarakat sekitar Rp500 juta. Biaya-biaya tersebut telah diatur dalam dokumen Amdal.



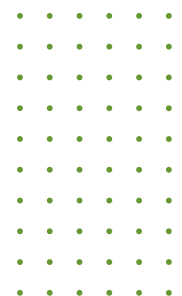
Dari perspektif akuntansi keuangan konvensional, semua pengeluaran tersebut (Rp24 miliar) akan diakui dan diperlakukan sebagai beban periodik dalam laporan laba rugi perusahaan. Alasannya, pengorbanan sumber dana tersebut tidak memiliki potensi manfaat ekonomi yang cukup pasti bagi perusahaan di masa datang sehingga perlakuan akuntansinya adalah sebagai beban periodik. Jurnalnya sebagai berikut.

Beban lingkungan	Rp 20 miliar
Beban sosial	Rp 4 miliar
Kas	Rp 24 miliar

Dampak negatif periodiknya adalah kas (aset) dalam Laporan Posisi Keuangan berkurang Rp24 miliar. Sementara itu, dalam Laporan Kinerja Keuangan (laporan laba rugi), kerugian PT ABC akan meningkat sebesar Rp24 miliar. Peningkatan kerugian tersebut berdampak negatif pada menurunnya nilai ekuitas sebesar Rp24 miliar. Hal inilah yang menyebabkan banyak perusahaan baru pada tahap start-up selalu berusaha menghindari atau menolak melaksanakan program TJS LP atau CSR karena dinilai membebani dan merugikan perusahaan dan pemilik modal.



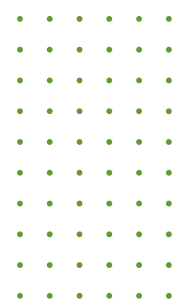
Sementara dari perspektif Akuntansi Hijau, semua pengeluaran tersebut bisa diakui sebagai investasi strategis dalam membangun relasi yang harmonis dan produktif dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Tujuan dari pengorbanan tersebut adalah agar masyarakat bisa menerima dan mendukung kehadiran perusahaan. Biaya untuk membuka akses jalan masuk, mengolah dan membuang limbah, serta penghijauan lingkungan sebesar Rp20 miliar dapat diakui sebagai investasi lingkungan dari pendekatan akuntansi lingkungan karena memiliki potensi manfaat ekonomi dan nonekonomi yang cukup pasti di masa depan bagi perusahaan. Sementara dari pendekatan akuntansi sosial, biaya untuk bantuan permodalan UKM, bantuan sosial-keagamaan, bantuan CSR untuk pengentasan kemiskinan kepada pemerintah setempat, dan bantuan beasiswa pendidikan sebesar Rp4 miliar dapat diakui sebagai investasi sosial. Pengorbanan tersebut juga memiliki potensi manfaat ekonomi dan nonekonomi yang cukup pasti bagi perusahaan di masa depan.



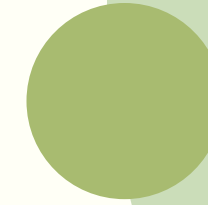
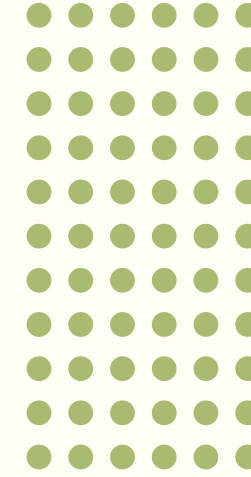
Dari perspektif proses Akuntansi Hijau, peringkasan terhadap pengorbanan sumber daya ekonomi untuk biaya TJS LP dan CSR dalam bentuk jurnal adalah sebagai berikut.

Investasi lingkungan	Rp 20 miliar
Investasi sosial	Rp 4 miliar
Kas	Rp 24 miliar

Berdasarkan jurnal di atas, pengorbanan sumber daya ekonomi PT ABC untuk melaksanakan TJS LP dan CSR sebesar Rp24 miliar pada tahap prakonstruksi dan konstruksi tidak meningkatkan beban perusahaan karena tidak diperlakukan sebagai beban periodik yang memperbesar kerugian perusahaan. Meskipun pengorbanan tersebut menguras kas (aset lancar) Rp24 miliar pada saat pelaksanaan TJS LP dan CSR, tetapi dalam struktur aset PT ABC akan muncul akun baru, yaitu investasi lingkungan Rp20 miliar dan investasi sosial Rp4 miliar, atau investasi TJS LP Rp24 miliar.

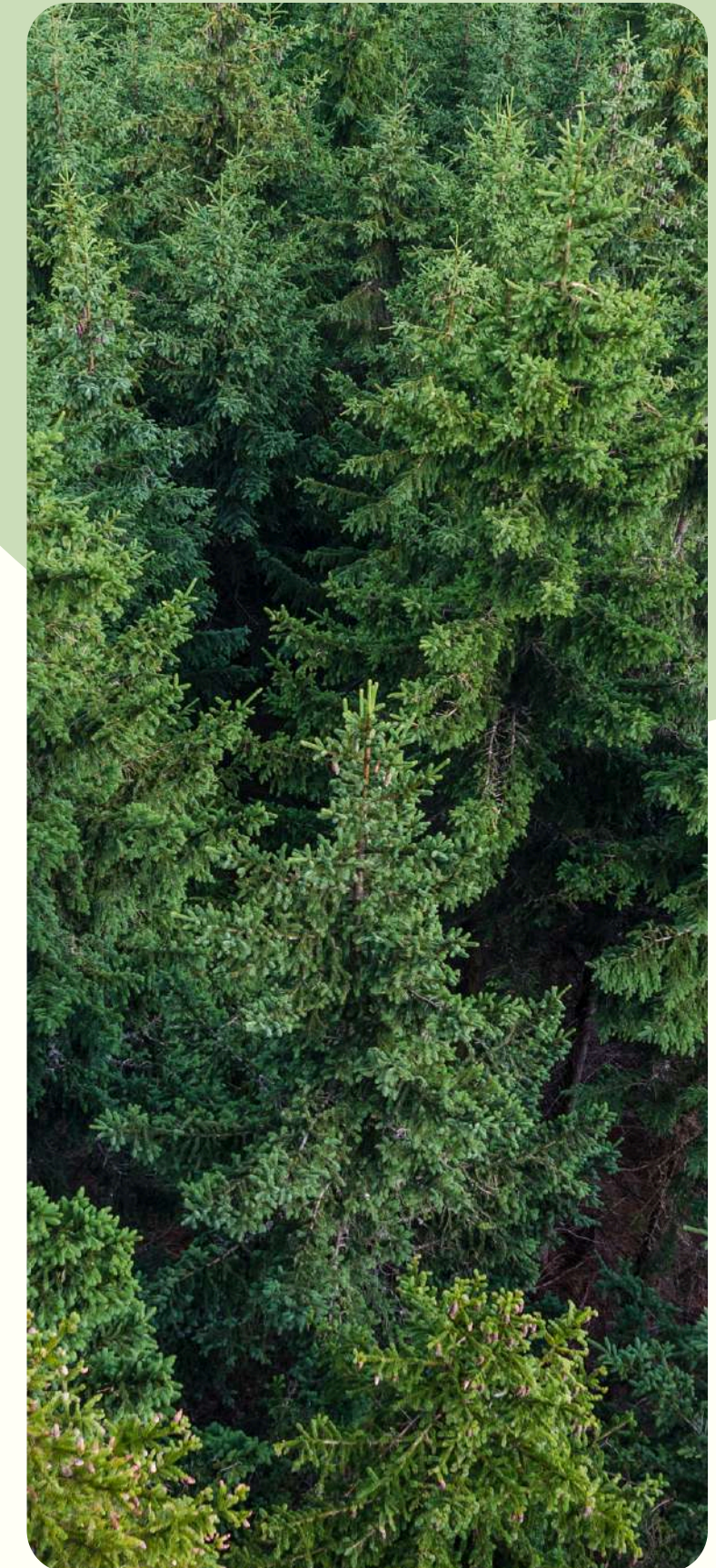


Biaya Korporasi

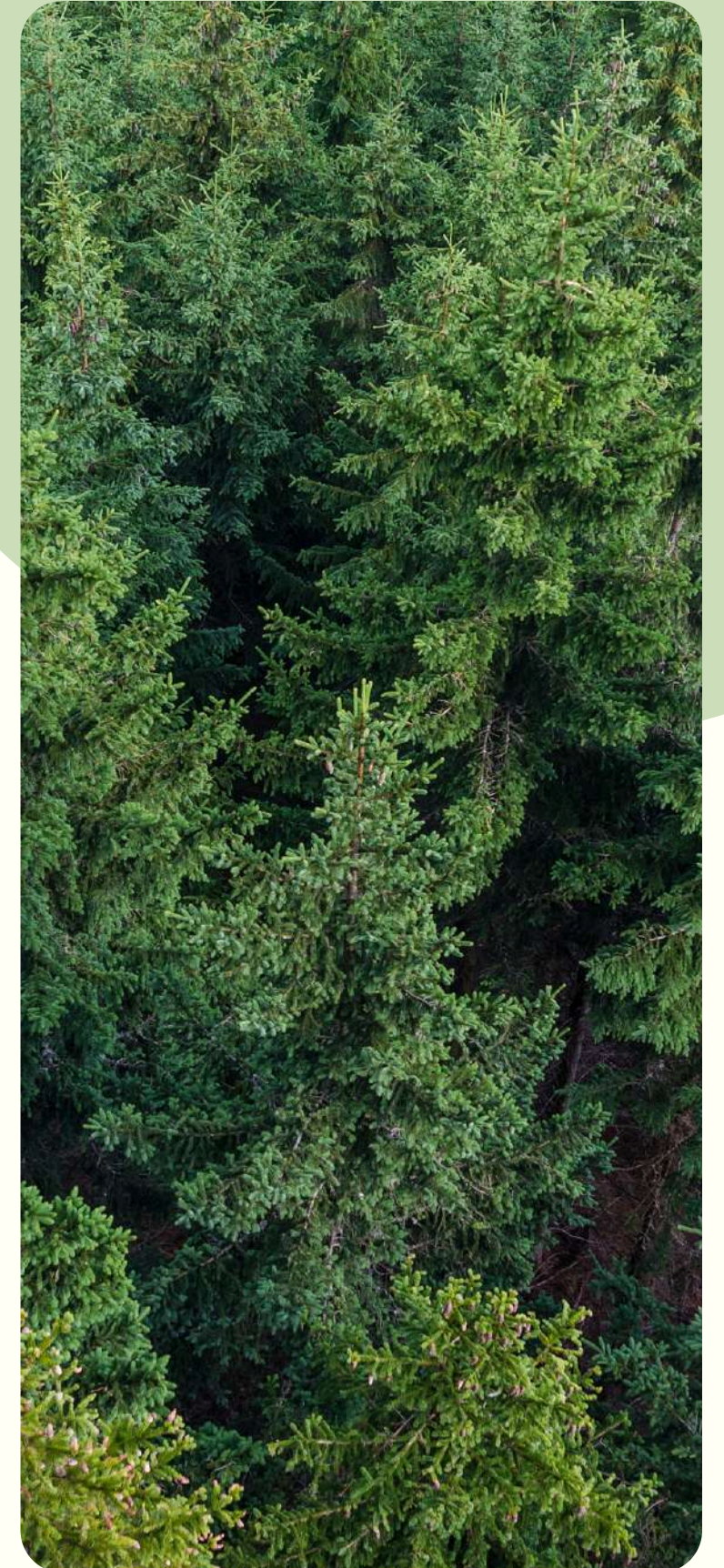


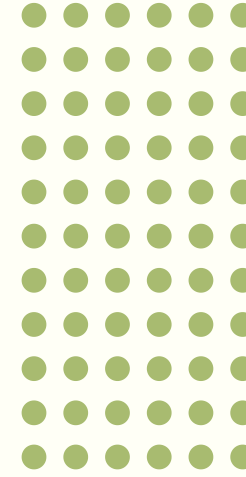
Biaya korporasi hijau adalah biaya yang timbul karena kesadaran perusahaan untuk menjadikan perusahaan secara visi dan fisik, serta secara bisnis dan operasional peduli dan ramah terhadap lingkungan dan masyarakat dalam manajemen dan praktik bisnisnya. Biaya yang termasuk dalam kelompok biaya korporasi hijau seperti

- Biaya untuk studi kelayakan dan perencanaan
- Biaya untuk membuka lahan atau lokasi perusahaan dengan cara yang ramah lingkungan
- Biaya atau investasi untuk bangunan hijau, pabrik hijau, mesin hijau, dan peralatan pabrik atau perlengkapan kantor yang ramah lingkungan dll.

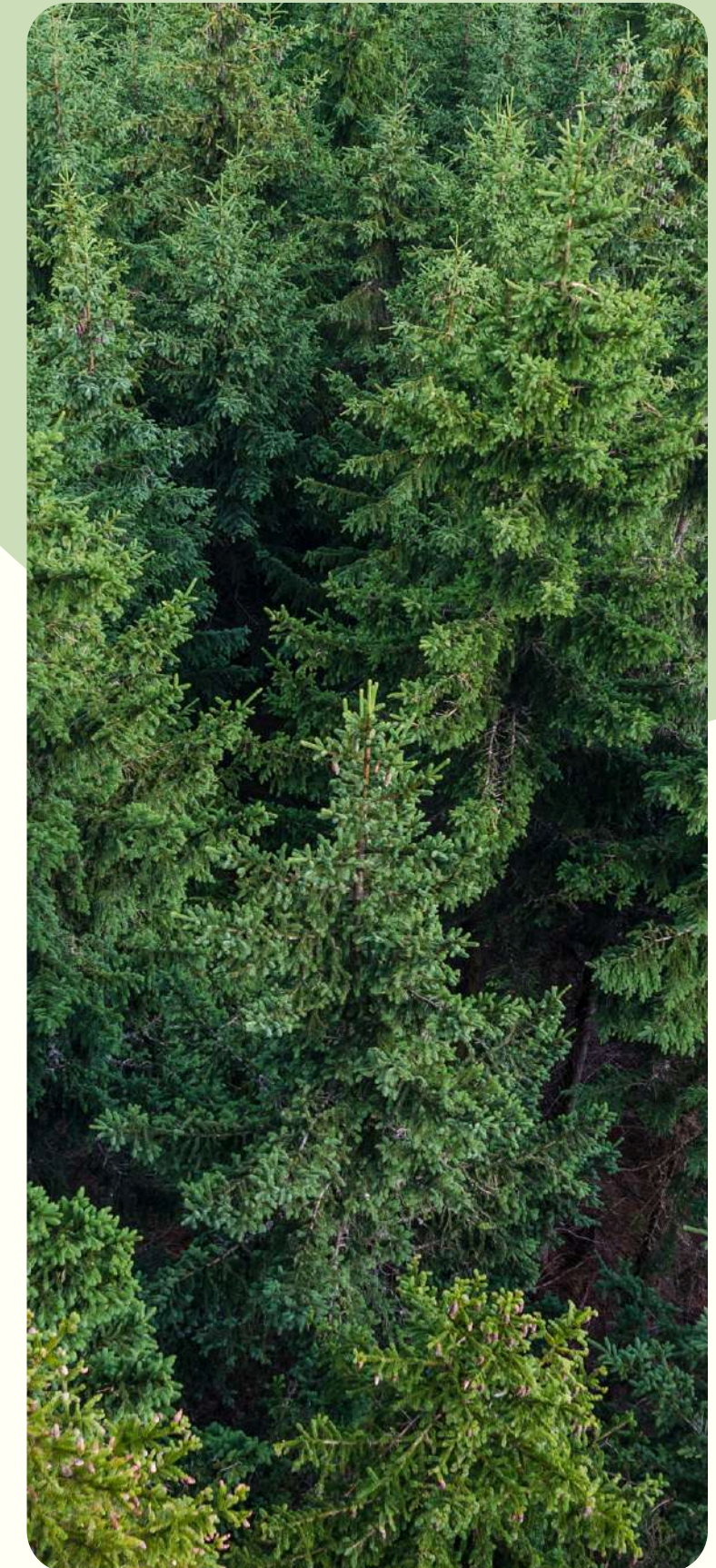


Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pengorbanan sumber daya ekonomi untuk biaya-biaya wajib tersebut? Bagaimana dampaknya terhadap kinerja dan nilai perusahaan? Dari perspektif Akuntansi Hijau, kebanyakan biaya hijau tersebut memenuhi "kriteria pengakuan" sebagai pengorbanan investasi (aset) untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan nonekonomi di masa depan. Biaya-biaya hijau yang layak diakui sebagai pengorbanan investasi hijau antara lain: 1) biaya untuk studi kelayakan dan perencanaan; 2) biaya membuka lahan baru dengan cara yang ramah lingkungan; 3) investasi untuk bangunan hijau, pabrik hijau, mesin hijau, dan peralatan pabrik atau perlengkapan kantor yang ramah lingkungan; 4) biaya untuk membangun sistem manajemen, sistem bisnis dan operasi bisnis, serta sistem pengendalian dan sistem audit yang ramah lingkungan; 5) biaya pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kepada pimpinan dan semua karyawan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip korporasi hijau dalam tata kelola korporasi dan bisnis; 6) biaya untuk membangun bisnis hijau, 7) biaya untuk pengolahan limbah cair dan padat, serta daur ulang sampah dan produk rusak; dan 8) biaya TJSL/CSR yang berkesinambungan kepada masyarakat, pemerintah, dan lingkungan setempat. Biaya-biaya tersebut layak diakui sebagai investasi sosial dan lingkungan. Pelaporannya adalah pada akun investasi sosial dan lingkungan pada kelompok aset dalam laporan posisi keuangan.





Sementara biaya-biaya hijau yang dapat langsung diperlakukan sebagai beban periodik dan dilaporkan dalam laporan laba rugi antara lain: 1) Biaya monitoring dan audit sosial-lingkungan yang melibatkan auditor eksternal atau pihak independen; 2) biaya untuk pelaporan dan pengungkapan informasi hijau kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas dalam laporan tahunan direksi, laporan keberlanjutan, dan sebagainya; 3) biaya riset dan pengembangan untuk menganalisis dampak sosial dan lingkungan dari operasi perusahaan atau menganalisis relasi ekonomi, sosial, dan lingkungan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan; 4) biaya-biaya lain yang bersifat periodik dan tidak berpotensi untuk memberikan manfaat ekonomi dan nonekonomi yang cukup pasti di masa depan. Biaya-biaya tersebut dilaporkan dalam laporan laba rugi periodik yang mengurangi laba korporasi.

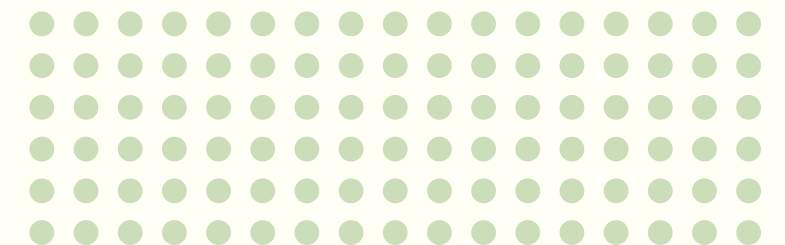
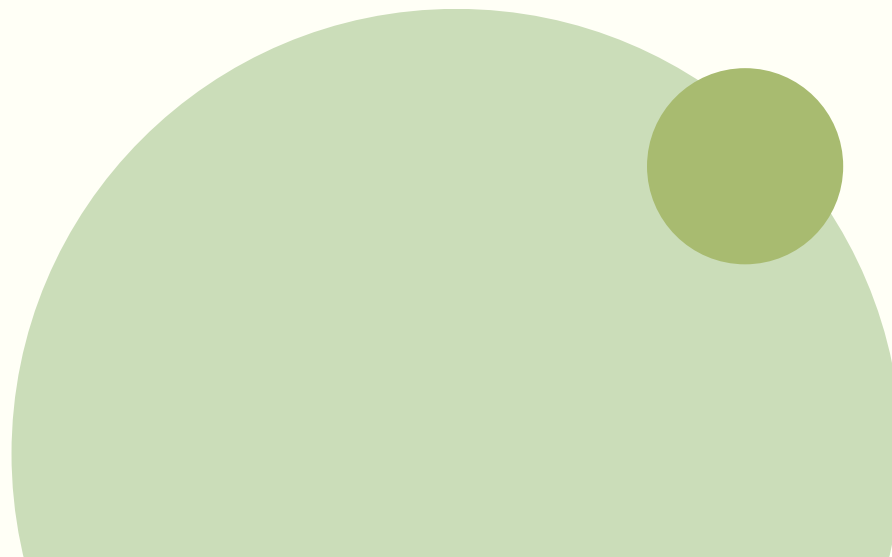


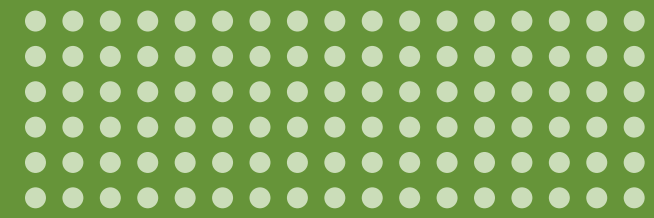


Biaya Relasional



Biaya relasional merupakan pengeluaran sukarela perusahaan untuk membangun hubungan harmonis dengan pemangku kepentingan melalui program seperti CSR, dengan tujuan meningkatkan reputasi, meminimalkan risiko, dan memperkuat prospek jangka panjang. Dalam akuntansi konvensional, biaya ini dianggap sebagai beban periodik yang menurunkan laba dan sering dibebankan kepada konsumen melalui harga, sedangkan dalam akuntansi hijau diperlakukan sebagai investasi karena memiliki manfaat masa depan, sehingga meningkatkan kinerja keuangan, nilai perusahaan, dan tidak membebani konsumen.





Biaya Kontinjen

Biaya kontinjen merupakan biaya yang timbul dari kejadian tak terduga atau komitmen perusahaan untuk menanggung dampak sosial dan lingkungan, seperti pemulihan kerusakan, kompensasi, dan program CSR bagi masyarakat. Dalam akuntansi konvensional, biaya ini dicatat sebagai beban dan liabilitas sehingga menurunkan laba dan ekuitas, sedangkan dalam akuntansi hijau diperlakukan sebagai investasi sosial dan lingkungan yang meningkatkan aset tanpa membebani kinerja keuangan secara langsung.



Laporan Keberlanjutan

Secara umum, tujuan penyusunan laporan keberlanjutan adalah:

Informasi kinerja ESG
komprehensif

Keputusan keberlanjutan

Transparansi dan akuntabilitas

Reputasi dan kepercayaan
publik

Identifikasi risiko dan peluang

Laporan keberlanjutan adalah laporan yang disusun oleh perusahaan untuk mengungkapkan kinerja dan dampak aktivitasnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terintegrasi kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini merupakan bagian dari implementasi akuntansi hijau yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

Prinsip-Prinsip Laporan Keberlanjutan

Penyusunan laporan keberlanjutan didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu:

Keseimbangan

Akurasi

Kejelasan

Keterbandingan

Ketepatan waktu

Keandalan





Standar Laporan Berkelanjutan

Global Reporting Initiative (GRI)

Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

Integrated Reporting (IR)





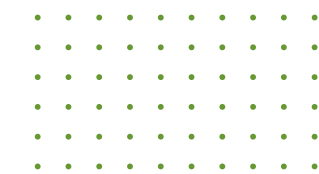
SOAL.

PT Bumi Lestari adalah perusahaan manufaktur yang mulai menerapkan praktik akuntansi hijau. Dalam laporan tahunannya, perusahaan melaporkan hal-hal berikut:

- Mengeluarkan biaya Rp2 miliar untuk pengolahan limbah dan pengurangan emisi
- Mengalokasikan Rp1 miliar untuk program CSR masyarakat sekitar
- Mengalami peningkatan laba sebesar 10% dibanding tahun sebelumnya

Namun, perusahaan tidak mengungkapkan secara rinci dampak sosial dan lingkungan dalam laporan keberlanjutannya.

Analisislah apakah laporan keberlanjutan PT Bumi Lestari telah mencerminkan prinsip-prinsip laporan keberlanjutan yang baik. Jelaskan kekuatan dan kelemahannya, serta berikan rekomendasi perbaikan agar laporan tersebut lebih relevan dan sesuai dengan konsep akuntansi hijau.



BAB 8

AUDIT LINGKUNGAN DAN SOSIAL



KONSEP AUDIT LINGKUNGAN

Audit lingkungan adalah proses evaluasi, verifikasi, dan penilaian secara sistematis, terdokumentasi, objektif, dan periodik terhadap kinerja pengelolaan lingkungan suatu organisasi. Audit ini bertujuan untuk:

01

Menilai kepatuhan terhadap regulasi lingkungan

03

Mengevaluasi efektivitas sistem manajemen lingkungan

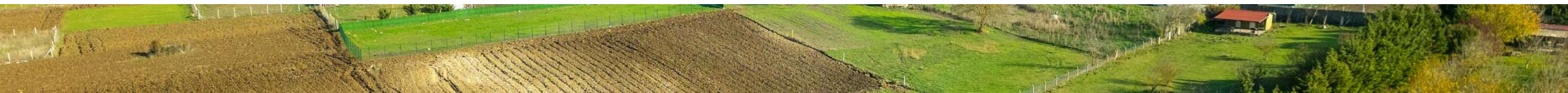
02

Mengidentifikasi risiko dan dampak lingkungan

04

Memberikan dasar perbaikan berkelanjutan

Secara sederhana, audit lingkungan merupakan alat manajemen untuk menilai apakah kegiatan perusahaan telah sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan ketentuan hukum.



KARAKTERISTIK UTAMA AUDIT LINGKUNGAN

Audit lingkungan memiliki ciri khas sebagai berikut:

01

Dilakukan secara sistematis dan terstruktur

02

Bersifat terdokumentasi dan dapat diverifikasi

03

Dilaksanakan secara objektif dan independen

04

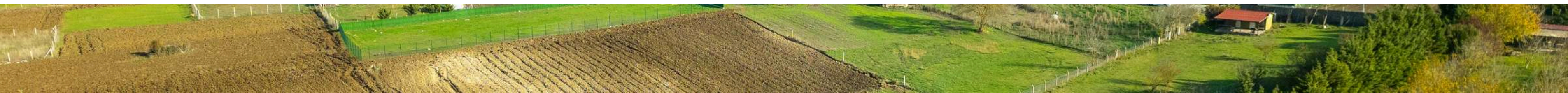
Bersifat periodik (berkala)

05

Menggunakan standar dan kriteria tertentu

06

Menghasilkan laporan tertulis sebagai dasar pengambilan keputusan



TUJUAN AUDIT LINGKUNGAN

Tujuan utama audit lingkungan meliputi:

01

Mengidentifikasi risiko dan potensi masalah lingkungan

02

Menilai tingkat kepatuhan terhadap regulasi

03

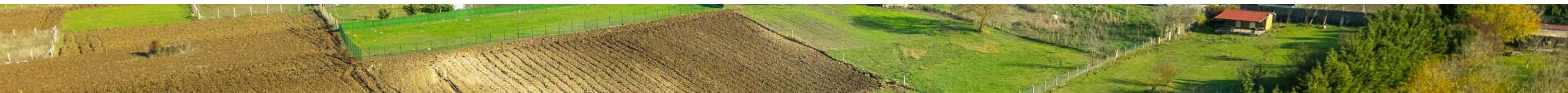
Mengevaluasi kinerja pengelolaan lingkungan

04

Memberikan rekomendasi perbaikan

05

Mendukung pengambilan keputusan manajerial



FUNGSI DAN PERAN AUDIT LINGKUNGAN

Audit lingkungan berfungsi sebagai:

01

Alat pengendalian dan evaluasi manajemen lingkungan

02

• Sarana peningkatan kepatuhan hukum

03

Pendukung dokumen AMDAL

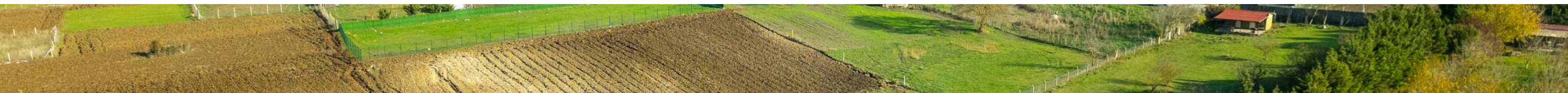
04

Instrumen efisiensi sumber daya dan pengurangan limbah

05

Strategi peningkatan keberlanjutan perusahaan

Dalam pembangunan, audit lingkungan berperan sebagai alat manajemen lingkungan, sarana peningkatan kinerja lingkungan, dan bukti akuntabilitas perusahaan.





KONSEP AUDIT SOSIAL

Audit sosial adalah proses evaluasi sistematis untuk menilai dampak dan kinerja suatu organisasi terhadap aspek sosial, etika, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Audit ini bertujuan memastikan bahwa aktivitas perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pemangku kepentingan.

TUJUAN AUDIT SOSIAL

01

Menilai dampak sosial

02

Memastikan kepatuhan

03

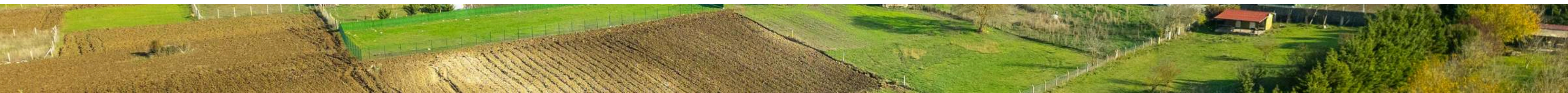
Meningkatkan transparansi

04

Mengidentifikasi risiko sosial

05

Mendukung keberlanjutan





Ruang lingkup audit sosial

> **Karyawan** → hak tenaga kerja, keselamatan kerja, kesejahteraan

> **Masyarakat** → dampak sosial, program CSR, hubungan komunitas

> **Konsumen** → kualitas produk dan perlindungan konsumen

> **Etika bisnis** → kepatuhan terhadap norma dan nilai sosial





Prinsip Audit Sosial

Pelaksanaan audit sosial didasarkan pada prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan keberlanjutan.

Manfaat Audit Sosial

Audit sosial memberikan manfaat seperti meningkatkan reputasi, hubungan stakeholder, mengurangi konflik, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan mendukung keberlanjutan bisnis.

Prosedur Dasar Audit

01

Perencanaan Audit

Penetapan tujuan audit, ruang lingkup, pembentukan tim auditor, serta pengumpulan dokumen awal seperti AMDAL, SOP, dan laporan lingkungan.

02

Pengumpulan Data dan Informasi

Melakukan studi dokumen, observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, serta pengumpulan data aspek lingkungan dan sosial.

03

Evaluasi dan Analisis

Menilai tingkat kepatuhan terhadap regulasi, mengidentifikasi risiko dan dampak, serta membandingkan kondisi aktual dengan standar yang berlaku.

Prosedur Dasar Audit

04

Verifikasi dan Pembuktian

Melakukan pengujian dan validasi data melalui bukti lapangan untuk memastikan keakuratan informasi.

05

Penyusunan Laporan Audit

Menyusun laporan yang berisi temuan audit, tingkat kepatuhan, identifikasi risiko, serta rekomendasi perbaikan.

06

Tindak Lanjut dan Perbaikan

Melakukan penyampaian hasil audit kepada manajemen, menyusun rencana aksi, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan.



Prinsip Audit Sosial



Circular Models

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.



Investing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

BAB 9

DAMPAK TERHADAP KINERJA DAN PASAR



Dampak terhadap kinerja lingkungan

- Efisiensi penggunaan energi dan air
- Pengurangan emisi gas rumah kaca.
- Manajemen limbah dan material berbahaya.
- Inovasi dalam desain produk ramah lingkungan.

Penelitian oleh Friede, Busch, & Bassen (2024) menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor ESG tinggi memiliki performa lingkungan yang lebih baik secara signifikan, terutama dalam hal emisi dan efisiensi energi.



Dampak terhadap Kinerja Keuangan



Dari sisi keuangan, berbagai studi menunjukkan bahwa integrasi ESG berdampak positif terhadap profitabilitas, nilai perusahaan, dan akses pembiayaan. ESG berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko non-keuangan yang berdampak finansial, seperti risiko litigasi lingkungan, risiko reputasi, dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Keterkaitan Sinergis

Terdapat hubungan saling menguatkan antara perbaikan kinerja lingkungan dan hasil keuangan, yaitu efisiensi energi menurunkan biaya operasional, manajemen limbah yang efektif mengurangi risiko denda, dan inovasi hijau menciptakan peluang pasar baru. Hal ini menciptakan efek spiral positif di mana keberlanjutan mendorong profitabilitas, kemudian profitabilitas mendukung keberlanjutan.

Dalam perspektif jangka panjang, perusahaan yang mengabaikan faktor lingkungan justru akan menghadapi risiko stranded asset, eksklusi dari indeks hijau, dan tekanan investor yang pada akhirnya menggerus nilai perusahaan.



Peran Green Intellectual Capital

Green Intellectual Capital (GIC) atau modal intelektual hijau merujuk pada keseluruhan aset pengetahuan, kompetensi, dan inovasi yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk menghasilkan nilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. GIC mencakup tiga pilar utama, yaitu *Green Human Capital*, *Green Structural Capital*, dan *Green Relational Capital*.

Dalam era transformasi hijau dan disrupsi ESG, GIC berperan sebagai penggerak strategis bagi perusahaan untuk membangun kapabilitas lingkungan berbasis pengetahuan, yang tidak hanya mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan, tetapi juga mendorong inovasi, efisiensi, dan daya saing jangka panjang.





Dampak terhadap nilai perusahaan

ESG sebagai sinyal pasar tentang nilai keberlanjutan

CSR sebagai instrumen reputasi dan preferensi investor

Akuntansi hijau dan transparansi lingkungan sebagai penentu valuasi

Dalam lanskap bisnis modern yang semakin digerakkan oleh prinsip keberlanjutan dan transparansi, keterkaitan antara praktik Environmental, Social, and Governance (ESG), Corporate Social Responsibility (CSR), dan Green Accounting terbukti memainkan peran krusial dalam memengaruhi nilai pasar dan harga saham perusahaan. Ketiga komponen ini bila diimplementasikan secara konsisten dan terintegrasi mampu meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi persepsi risiko, dan memicu apresiasi pasar modal terhadap prospek jangka panjang perusahaan



SOAL

PT Hijau Sejahtera merupakan perusahaan yang mulai mengintegrasikan prinsip ESG dalam operasionalnya. Perusahaan melakukan berbagai inisiatif seperti:

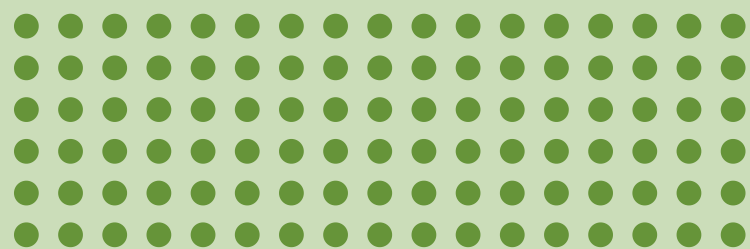
- Mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi energi
- Mengembangkan program CSR untuk masyarakat sekitar
- Meningkatkan transparansi laporan keberlanjutan

Setelah 3 tahun, perusahaan mengalami:

- Penurunan biaya operasional
- Peningkatan kepercayaan investor
- Kenaikan harga saham di pasar

Pertanyaan:

Analisislah hubungan antara penerapan ESG dengan kinerja lingkungan dan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Jelaskan bagaimana kedua aspek tersebut saling memengaruhi serta dampaknya terhadap nilai perusahaan di pasar modal



EKONOMI HIJAU

Solusi Ekonomi dalam Menghadapi Perubahan Iklim



Memperkenalkan konsep ekonomi hijau sebagai alternatif yang ramah lingkungan.

MULAI PRESENTASI 

BAB 10

TANTANGAN DAN MASA DEPAN





Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan, kualitas data *Environmental, Social, and Governance (ESG)* telah menjadi fondasi utama dalam menilai kinerja dan integritas korporasi. Data yang andal, disusun dengan prinsip integritas informasi, dan diverifikasi melalui audit independen, menjadi syarat mutlak dalam menciptakan kepercayaan dari investor, regulator, dan publik.



Kualitas dan Validitas Data ESG

Data ESG tidak sekadar angka pelengkap dalam laporan keberlanjutan, melainkan merupakan representasi dampak riil perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Untuk itu, data harus memenuhi prinsip relevansi, ketepatan waktu, keterbandingan, dan keterverifikasian (GRI, 2023). Kegagalan dalam menjamin integritas data dapat berujung pada hal-hal berikut:

- Risiko greenwashing
- Klaim keberlanjutan yang keliru
- Distorsi dalam pengambilan keputusan investasi

Banyak studi menunjukkan bahwa ketidakakuratan atau kekaburan dalam pelaporan emisi, jejak karbon, atau data sosial menjadi penyebab utama menurunnya nilai ESG suatu perusahaan.



Integritas Informasi sebagai Pilar Tata Kelola ESG

Integritas informasi ESG mencakup kejujuran, konsistensi, dan transparansi dalam pengungkapan data, baik kuantitatif maupun kualitatif. Elemen-elemen penting yang harus dijaga meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pengungkapan metodologi perhitungan (misalnya, emisi Scope 1-3).
- Kesesuaian dengan standar pelaporan global (GRI, SASB, TCFD, ISSB).
- Konsistensi lintas tahun dan lintas entitas.

Perusahaan yang menjaga integritas informasi ESG cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik dan investor lebih tinggi, serta lebih siap menghadapi regulasi pelaporan wajib, seperti IFRS S1 dan S2 atau EU CSRD.



Audit ESG: Dari Sukarela Menuju Standar Wajib

Untuk memastikan validitas data ESG, diperlukan proses audit keberlanjutan oleh pihak independen. Saat ini, praktik audit ESG bergerak dari pendekatan sukarela ke arah regulasi wajib seperti hal-hal sebagai berikut:

- EU CSRD: Mengharuskan audit atas laporan keberlanjutan untuk perusahaan besar mulai tahun 2025.
- ISSB & GRI Alignment: Mendorong keselarasan audit lingkungan dengan praktik akuntansi keuangan.
- OJK & IDX (Indonesia): Mendorong pelaporan ESG dan jaminan sebagai bagian dari Good Corporate Governance (GCG).

Audit ESG tidak hanya menilai keabsahan data, tetapi juga menguji sistem pengelolaan risiko, strategi keberlanjutan, dan keterkaitan antara ESG dengan kinerja keuangan.



Risiko *Greenwashing*

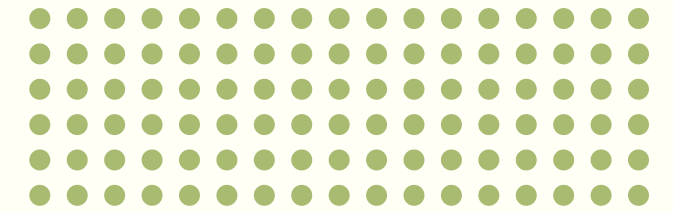
Greenwashing merujuk pada praktik perusahaan yang secara sengaja atau tidak menyampaikan klaim keberlanjutan yang menyesatkan, dilebih-lebihkan, atau tidak dapat diverifikasi demi membentuk citra ramah lingkungan di mata publik. Fenomena ini menjadi ancaman serius terhadap kepercayaan pemangku kepentingan karena dapat menimbulkan asimetri informasi, disonansi etika, dan krisis reputasi.

Dalam konteks pasar modal dan pelaporan ESG yang semakin berkembang, greenwashing dapat terjadi melalui beberapa hal berikut.

- Penggunaan label hijau tanpa dasar ilmiah atau data terukur
- Klaim net zero tanpa peta arah atau target jangka pendek yang kredibel
- Penyajian data lingkungan yang tidak lengkap atau tidak diaudit



Tren Masa Depan Sustainability Reporting



Tradisionalnya, sistem akuntansi didesain untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan perusahaan. Namun, dalam konteks saat ini, akuntansi harus memperluas cakupan untuk beberapa hal berikut.



- **Mengukur biaya eksternalitas lingkungan, seperti emisi karbon, penggunaan air, dan limbah**
- **Merekam investasi dalam inisiatif hijau, seperti efisiensi energi, transisi energi dan konservasi**
- **Mengintegrasikan indikator risiko dan peluang ESG ke dalam laporan tahunan dan pengambilan keputusan manajerial.**

Banyak perusahaan global telah mulai menerapkan pendekatan, seperti full cost accounting, environmental management accounting (EMA), dan pelaporan triple bottom line (TBL).

Daftar Pustaka

- Banke-Thomas, A. O., Madaj, B., Charles, A., & van den Broek, N. (2015). Social Return on Investment (SROI) methodology to account for value for money of public health interventions: a systematic review. *BMC Public Health*, *15*(1), 582. <https://doi.org/10.1186/s12889-015-1935-7>
- Choiriah, S., Temalagi, S., Oktris, L., Halim, S., & Monalika, H. P. (2025). *Akuntansi Lingkungan*. Penerbit Salemba Empat.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2007). *Managerial Accounting 8th edition* (8th ed.). Thomson South-Western.
- Lako, A. (2018). *Akuntansi Hijau: Isu, Teori, dan Aplikasi*. Penerbit Salemba Empat.